

## **PENGEMBANGAN LPK MELALUI VISITASI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**Elisabet Tambunan<sup>1)</sup>, Mery Lani Purba<sup>2)</sup>, Eva Margaret Sarah Nainggolan<sup>3)</sup>\***

1,2, dan 3) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Indonesia

Email : [elisabet.tambunan19@gmail.com](mailto:elisabet.tambunan19@gmail.com)

### **Abstrak**

Pada era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi yang kreatif, terampil, inovatif dan kompetitif. Begitu juga dengan keberadaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yaitu optimalisasi keberadaan teknologi digital dan yang pasti harus terakreditasi. Dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Salah satunya minimnya pemahaman para pengelola LPK terhadap akreditasi tersebut yaitu para pengelola kurang memperhatikan atau memahami isi Permenaker Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Hal ini mengakibatkan pemahaman konsep pentingnya akreditasi berdasarkan regulasi yang ada menjadi sangat minim. Berdasarkan serangkaian kegiatan visitasi akreditasi LPK di Kabupaten Humbang Hasundutan yang disertai dengan bimbingan teknis memberikan dampak pengembangan yang positif bagi para pengelola LPK. Manfaat akreditasi LPK: (1.) Dapat memudahkan akses terhadap LPK yang kredibel; (2.) Dapat terjaminnya kualitas pelayanan LPK; (3.) Dapat meningkatkan citra kompetensi dan daya saing lulusan; (4.) Dapat memudahkan pemilihan partner kerja sama dalam pengembangan SDM; (5.) Dapat memudahkan rekrutmen maupun seleksi penerimaan karyawan. Hal ini disebabkan karena LPK yang meluluskan sudah dapat menjamin akan siap pakai untuk menghadapi pesaing dalam negeri maupun luar negeri sehingga Disnaker dapat mengatasi pengangguran di kabupaten Humbang Hasundutan.

**Kata kunci:** pengembangan, LPK, visitasi akreditasi

### **Abstract**

*In the era of industrial revolution 4.0, the education needed is something can form a creative, skill, innovative and competitive generation. Same as the existence of the job training institute (LPK – Lembaga Pelatihan Kerja), it is required can adapt to the times, namely optimizing the existence of digital technology and definitely must be accredited. In implementing the job training institute there are many obstacles and resistances to be faced. One of them is lack of job training institute managers' understanding on the accreditation where they do not pay attention or understand the content of Permenaker No. 17 of 2016 concerning Licensing and Registration of the job training institute. This is causes the minimum understanding about the importance concept of accreditation based on regulation. Based on the series of job training institute accreditation visitation activities in Humbang Hasundutan regency accompanied by technical guidance give a positive impact to development of the job training institute' managers. The advantages of the job training institute accreditation are: (1.) It can facilitate the access to the credible job training institutes; (2.) It can guarantee the quality of the job training institutes services; (3.) It can improve the image of competence and competitiveness of graduates; (4.) It can facilitate the selection of partners for cooperation in human resource development; (5.) it can facilitate recruitment and selection of employee admissions. This is because the job training institutes which graduated can guarantee that it will be ready to use to face domestic and foreign competitors so the Manpower Office can overcome the unemployment in Humbang Hasundutan regency.*

**Keywords:** development, the job training institute, accreditation visitation

## **PENDAHULUAN**

Di masa sekarang ini, masyarakat semakin cerdas dalam memilih Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang layak dan kompeten. Tentunya mereka akan memilih sebuah lembaga yang sudah terakreditasi. Bagi LPK yang belum terakreditasi, cepat atau lambat akan ditinggalkan.

Pada era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi yang kreatif, terampil, inovatif dan kompetitif. Begitu juga dengan keberadaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yaitu optimalisasi keberadaan teknologi digital dan yang pasti harus terakreditasi.

## **ANALISIS SITUASIONAL**

Akreditasi merupakan suatu keharusan bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menjaga mutu pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi, adalah LPK yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, karena telah memenuhi 8 standar yang sudah ditetapkan. 8 Standar Mutu yang dimaksud terdiri dari: (1.) Kompetensi Kerja; (2.) Kurikulum dan Silabi; (3.) Materi Pelatihan Kerja; (4.) Assesment Pelatihan Kerja; (5.) Instruktur dan Tenaga Pelatihan; (6.) Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja; (7.) Tata Kelola LPK; (8.) Keuangan.

Pada akhirnya dari akreditasi suatu lembaga adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu. Tentunya hal ini sangat penting bagi lembaga itu sendiri agar tetap diminati oleh masyarakat. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan kedepannya semakin banyak LPK di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempersiapkan diri untuk melakukan Akreditasi di Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini berupa visitasi akreditasi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Direncanakan akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 2 – 4 September 2020. Adapun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mengikuti visitasi akreditasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut: (a.) LPK Bina Karya; (b.) LPK Sariman Taylor; (c.) LPK Primus Taylor

## **METODE EVALUASI**

Metode evaluasi yang dilakukan adalah berdasarkan Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) suatu kesatuan yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Mutu yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh LPK yang akan menyelenggarakan Pelatihan Kerja berdasarkan Sertifikat Kualifikasi

Kerja (SKK) atau sebagian dari kualifikasi yang berdasarkan pada suatu Standar Klaster dari unit kompetensi yang terdaftar dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Program Pelatihan Kerja Tertentu. 8 Standar Mutu yang dimaksud terdiri dari: (1.) Kompetensi Kerja; (2.) Kurikulum dan Silabi; (3.) Materi Pelatihan Kerja; (4.) Assesment Pelatihan Kerja; (5.) Instruktur dan Tenaga Pelatihan; (6.) Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja; (7.) Tata Kelola LPK; (8.) Keuangan.

### **HASIL KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 hari dengan agenda acara sebagai berikut:

#### **Agenda Kegiatan Visitasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Di Kabupaten Humbang Hasundutan**

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Materi</b>	<b>Waktu</b>
Rabu 2September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyambutan kedatangan tim visitasi akreditasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan</li><li>• Sarapan pagi dan Breafling</li><li>• Kunjungan ke LPK yang akan diakreditasi di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu LPK Sariman Taylor</li></ul>	08.00 – 16.00 WIB
Kamis 3September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lanjutan kunjungan ke LPK yang akan diakreditasi di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:LPK Primus Taylor dan LPK Bina Karya.</li><li>• Melakukan bimbingan teknis tentang Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia(KMPI) suatu kesatuan yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Mutu yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh LPK yang akan menyelenggarakan Pelatihan Kerja berdasarkan Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK) atau sebagian dari kualifikasi yang berdasarkan pada suatu Standar Klaster dari unit kompetensi yang terdaftar dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Program Pelatihan Kerja Tertentu.</li><li>• Masing-masing LPK diberikan waktu untuk melengkapi poin-poin yang kurang setelah diberikan bimbingan dan arahan dari tim visitasi akreditasi.</li></ul>	08.00 – 16.00 WIB
Jumat 4 September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim memberikan penilaian dan bimbingan ke masing-masing LPK untuk menjadi lebih baik lagi.</li><li>• Penutupan dan tim meninggalkan lokasi Kabupaten Humbang Hasundutan</li></ul>	08.00 – 12.00 WIB

### **PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Dengan segala pertimbangan kegiatan ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 walaupun ada kemunduran jadwal. Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Mitra masih membutuhkan banyak perbaikan sesuai dengan arahan dan bimbingan dari tim visitasi akreditasi.

Berikut adalah seluruh rangkaian Kegiatan Visitasi Akreditasi di Tiga LPK di Kabupaten Humbang Hasundutan.

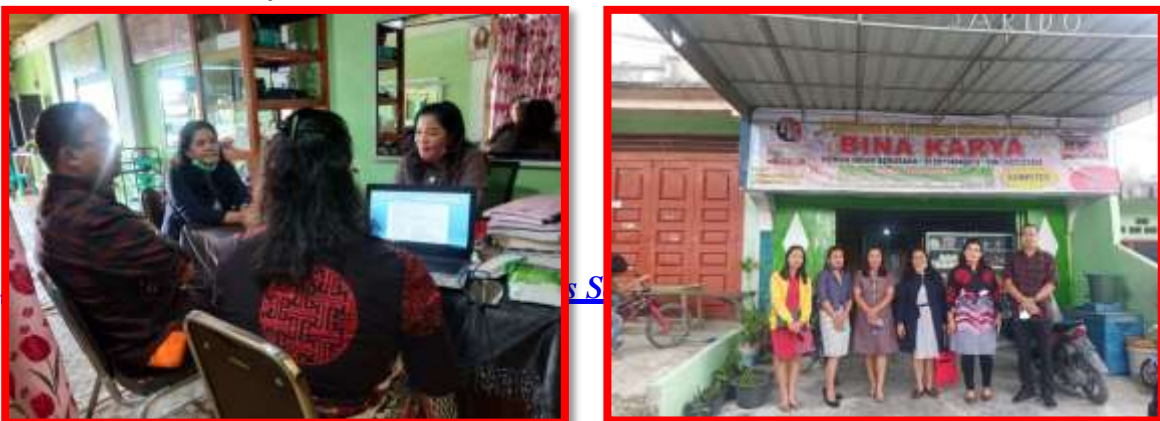
#### **1. LPK Sariman Taylor**



**2. LPK Primus Taylor**



**3. LPK Bina Karya**





## **SIMPULAN**

Berdasarkan serangkaian kegiatan visitasi akreditasi LPK di Kabupaten Humbang Hasundutan yang disertai dengan bimbingan teknis memberikan dampak yang positif bagi para pengelola LPK. Dengan adanya akreditasi LPK dapat memudahkan akses terhadap LPK yang kredibel serta dapat terjaminnya kualitas pelayanan LPK serta meningkatkan citra kompetensi dan daya saing lulusan serta dapat memudahkan pemilihan partner kerja sama dalam pengembangan SDM dan juga memudahkan rekrutmen maupun seleksi penerimaan karyawan karena LPK yang meluluskan sudah dapat terjamin akan siap pakai untuk menghadapi pesaing dalam negeri maupun luar negeri sehingga Disnaker dapat mengatasi pengangguran di kabupaten Humbang Hasundutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tridarma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bid. Lattas, 2020, *Visitasi Akreditasi LPKS Di P. Lombok dan P. Sumbawa*, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2020
- Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2017, *Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Di Kabupaten Buleleng Tahun 2017*, <https://disnaker.bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2020
- Disnaker Bpp, 2019, *Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2019* <http://disnaker.balikipapan.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2020
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 8 *STANDAR MUTU AKREDITASI LA-LPK Eight Quality LA-LPK Accreditation Standards*, <https://la-lpk.kemnaker.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2020